

ABSTRAK

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah kristalisasi dari suatu langkah pendayagunaan keuangan daerah yang dilakukan secara terencana dan teratur sesuai dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu Peran serta masyarakat dalam hal penyusunan dan pengawasan APBD sangat diperlukan untuk menentukan arah kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Dalam hal ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan APBD.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian Normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan buku-buku yang digunakan sebagai bahan penelitian. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan APBD. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat belum berjalan dengan maksimal dan tidak sesuai dengan pertauran perundang-undangan. Sampai saat ini pelibatan masyarakat dalam Muasyawah Rencana Pembangunan (musrenbang) belum berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional yang mengatur adanya pelibatan masyarakat. Pemerintah daerah juga belum mengatur mengenai pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan APBD.

Kata Kunci: (Partisipasi publik, perencanaan dan pengawasan).

ABSTRACT

Regional budget (the Regional Budget) is crystallization a step of regional finance planned that is done with planning and managing relate to the needs public. Thus The role of the public in this arrangement and controlling Regional budget is needed to determine the direction policy that will be made by the government in managing Regional budget. In this formulation of problems will be reviewed is how the role of public in the Conference Development plan (Musrenbang) and How the role of Local Government to public involved in process of drafting and controlling the regional budget.

Writing method uses Normative approach method, namely through legislation approach and also use the books that are used as material for research. In this case, will be discussed about society participation in planning and controlling Regional budget. In this case, public participation is not maximum it does not relate with the rule of legislation. This time public participation in the Conference Development plan (musrenbang) is not maximum relate to government regulation number 40 year 2006 concerning the procedures for making national development plan which regulates society participation. Local Government has not been regulating about public participation in planning and controlling Regional budget.

Key words :public participation (planning and controlling,).